

Pendampingan Simulasi Visitasi Akreditasi Ban S/M Melalui Konsep Pemberdayaan

Muhamad Rudi Wijaya

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, STIS Darul Ulum Lampung Timur, Indonesia.
Email: rudiwijaya68@gmail.com

Abstract

School and madrasah accreditation is a comprehensive school/madrasah feasibility assessment process, the results of which are realized in the form of independent professional public accountability called BAN S/M. Accreditation practice can be seen from two things that are measured, namely the review of administrative compliance (compliance) and performance (performance) of the education unit for efficiency and easy and accountable implementation. The results of interviews with school principals that UPTD SD Negeri 1 Rejoagung Batanghari District, East Lampung Regency, Lampung has implemented eight National Education Standards regulating the change of the accreditation system by the National Accreditation Board (compliance) to performance-based (performance), which is emphasized on 4 main components What is assessed is the quality of graduates, the learning process, the quality of teachers, and the school/madrasah management has not been fully understood by the principal as well as education staff and education staff at UPTD SD Negeri 1 Rejoagung Batanghari District, East Lampung Regency, Lampung. Outcomes of service activities on the importance of school accreditation, understanding the flow of preparation of accreditation forms and documents. With this community service activity, it has an impact on understanding the importance of accreditation so that school awareness and responsibility will grow in ensuring the quality of quality education.

Keywords: Mentoring, Simulation, Accreditation Visitation, Empowerment.

Abstrak

Akreditasi sekolah dan madrasah merupakan proses penilaian kelayakan sekolah/madrasah secara komprehensif, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas publik profesional yang independen yang disebut BAN S/M. Praktik akreditasi dapat dilihat dari dua hal yang diukur, yakni peninjauan kepatuhan administrasi (compliance) dan kinerja (performance) satuan pendidikan untuk efisiensi dan pelaksanaan yang mudah dan akuntabel. Hasil wawancara dengan kepala Sekolah bahwa UPTD SD Negeri 1 Rejoagung Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sudah melaksanakan delapan Standar Nasional Pendidikan mengatur tentang perubahan sistem akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (compliance) menjadi berbasis kinerja (performance), yang ditekankan pada 4 Komponen utama yang dinilai adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, serta manajemen sekolah/madrasah belum sepenuhnya di pahami oleh Kepala sekolah maupun tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan di UPTD SD Negeri 1 Rejoagung Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung . Luaran kegiatan pengabdian akan pentingnya akreditasi sekolah, memahami alur penyusunan borang akreditasi dan dokumennya. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini berdampak pemahaman tentang pentingnya akreditasi sehingga akan tumbuh kesadaran dan tanggung jawab sekolah dalam menjamin mutu pendidikan yang berkualitas.

Kata Kunci: Pendampingan, Simulasi, Visitasi Akreditasi, Pemberdayaan

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif adalah dengan membagi tanggung jawab secara

proporsional kepada para guru. Satu prinsip terpenting dalam pemberdayaan ini adalah melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab. (Fitriyani 2019) Mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan, artinya menunjuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah. Yaitu dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun yang lain, serta lulusan relevan dengan tujuan. (Amrullah Aziz 2015)

Kelayakan Lembaga pendidikan sekolah/madrasah dapat diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas publik melalui proses akreditasi sekolah/madrasah yang berguna untuk menilai lembaga pendidikan tersebut secara komprehensif. Bergesernya mekanisme akreditasi pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi maka perlu maka dituntut suatu pemikiran yang cepat respon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. (Awaludin 2017)

UUD 1945 Pasal 31, tentang pendidikan menyatakan dengan jelas bahwa Pemerintah harus memajukan pendidikan dengan terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang bermutu, dan berakhlak mulia, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional.

Kebijakan Nasional dan standar nasional dalam menjamin mutu pendidikan sehingga tercapainya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat 2, dan pasal 60 ayat 1 yang dijadikan sebagai acuan proses untuk mengetahui kelayakan mutu suatu satuan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi baik itu jalur pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan oleh pemerintah, atau lembaga khusus yang independen sebagai bentuk pertanggung jawaban mutu secara komprehensif, obyektif dan transparan sesuai dengan instrumen atau indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional M. Zulkifli, (2015) Minuchin, (2003), sehingga satuan pendidikan atau sekolah memperoleh gambaran sebenarnya tentang mutu dari sekolah tersebut.

Didalam menentukan kualitas suatu lembaga pendidikan, sistem akreditasi memainkan peranan yang tidak hanya penting, tetapi juga strategis, antara lain:

- a. Pertama, memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat (Stakeholders) mengenai madrasah tertentu. Dengan informasi hasil akreditasi tersebut masyarakat memperoleh gambaran tentang kekurangan, kelebihan, peluang, dan ancaman yang dihadapi madrasah.
- b. Kedua, sebagai titik tolak para ahli pendidikan dan para pembina madrasah dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi madrasah. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan terhadap madrasah akan selalu kontekstual dan tepat sasaran.
- c. Ketiga, sebagai alat pengendalian kualitas. Dengan akreditasi yang komprehensif akan didapatkan peta madrasah dari segi kualitasnya. Ini tidak hanya penting bagi para pengambil kebijakan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi madrasah-madrasah bersangkutan. Informasi akurat yang didapat dari akreditasi akan menjadi titik tolak bagi madrasah bersangkutan untuk melakukan internal review yang dapat dijadikan patokan dalam peningkatan kualitas. (Ikhwan 2014)

Lembaga pendidikan dituntut untuk menghasilkan luaran berkualitas yang mengacu pada standar mutu sebagai landasan yang sudah disepakati, sehingga dapat diukur dan ditentukan.

Pasal 60 dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional menyebutkan Pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kelayakan mutu program pendidikan secara berkelanjutan dan terukur pada jalur pendidikan formal dan non formal pada jenjang dan jenis pendidikan dilakukan dengan akreditasi.

Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah sebagai bentuk penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang terhadap penentuan tingkatan kualitas. (Dewi and Ali 2020) Kelayakan Lembaga pendidikan sekolah/madrasah dapat diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas publik melalui proses akreditasi sekolah/madrasah yang berguna untuk menilai lembaga pendidikan tersebut secara komprehensif. Proses akreditasi untuk penilaian sebuah lembaga pendidikan dilakukan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional, yang disebut dengan BAN-S/M. Tahun 2019 BAN-S/M telah menetapkan perangkat akreditasi yang baru, atau disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP-2020) yang digunakan pada tahun 2020. Dinamika dalam dunia pendidikan yang banyak mengalami perubahan merupakan suatu alasan perubahan instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi yang digunakan pada tahun 2020 menggunakan sistem penilaian berbasis administrasi (*compliance*) menuju penilaian berbasis kinerja (*performance based*) atau dari *rules to principles*.

Pada awal tahun 2020, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN SM) telah mengeluarkan kebijakan baru tentang diterbitkannya Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 (IASP 2020), yang akan mulai diujicobakan pada tahun 2020 kepada sekolah-sekolah yang habis masa akreditasinya tahun 2020. Tampaknya sekolah secara tidak langsung akan dituntut memenuhi kedua komponen tersebut, dengan harapan implementasi SNP menjadi suatu kebutuhan yang membudaya. (Hidayat, 2020) Salah satu tuntutan lembaga pendidikan dasar dalam mewujudkan mutu pendidikan yaitu mewujudkan satuan pendidikan yang mampu menjadi public service yang sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional (BAN). Akreditasi Sekolah/Madrasah telah mengalami reformasi dengan menerapkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 2020) yang beralih dari Compliance Based menuju performance Based atau dari Rule Based menuju Principle Based. (Kayyis and Khoiriyah 2021)

Di Indonesia, proses akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan oleh badan akreditasi sekolah/madrasah (BAN SM) (Sumarto, 2019), sebuah Lembaga independent di bawah kementerian Pendidikan republic Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, BAN SM dibantu oleh sekretariat yang menangani pekerjaan-pekerjaan teknis administrative, dan dibantu oleh asesor sebagai pihak yang secara langsung melakukan proses visitasi akreditasi ke sekolah/madrasah. (Hasanah 2021) Perubahan instrumen akreditasi merupakan suatu bagian penting dari upaya BAN S/M sebagai lembaga independen dalam penjaminan mutu pendidikan untuk terlibat dalam mendorong *continuous improvement*. pendidikan (*performance*) melalui pengamatan langsung ke sekolah/madrasah. Sebagai bagian dari pendidikan bermutu, pelaksanaan akreditasi dari dua hal tersebut yaitu *compliance* dan *performance*, sekolah yang tidak memenuhi aspek *compliance* maka tidak dapat dilanjutkan dengan penilaian *performance*. Hal ini dilakukan untuk efisiensi dan pelaksanaan yang *simple* dan akuntabel. Penilaian *Compliance* yang akan dinilai melalui *compliance* berkaitan dengan mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, manajemen sekolah/madrasah, kurikulum, penilaian, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. Penilaian *Performance* Hal-hal yang akan dinilai untuk aspek *performance* adalah terkait dengan mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, dan manajemen sekolah/madrasah melalui kunjungan ke sekolah/madrasah. Penilaian menurut Mardapi (2008) Popham, (2009) yang dikutip oleh (Wewe, Rawa, Bela, Wangge, & Bhoke, 2020), memiliki manfaat untuk menentukan suatu keberhasilan suatu mutu pendidikan, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dan dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan suatu kebijakan atau program kerja yang baru.

Kelayakan satuan pendidikan tentu saja dipengaruhi banyak faktor, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, motivasi kerja guru, lingkungan sekolah yang kondusif, pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang rutin, Akreditasi sekolah, dan sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut, penulis memandang faktor Akreditasi sekolah merupakan salah satu faktor yang dominan, karena di dalamnya dapat menilai segala sesuatu yang berkaitan dengan layak atau tidaknya Sekolah/Madrasah untuk menyelenggarakan proses pendidikan. (Kogoya and Uruwaya 2022) Hasil wawancara dengan bapak Sugiarto, S.Pd selaku kepala Sekolah bahwa UPTD SD Negeri 1 Rejoagung sudah melaksanakan delapan Standar Nasional Pendidikan namun regulasi yang mengatur tentang perubahan sistem akreditasi oleh Badan Akreditasi tentang perubahan sistem akreditasi, dari perubahan paradigma berbasis kepatuhan administratif (*compliance*) menjadi berbasis kinerja (*performance*), yang ditekankan pada 4 Komponen utama yang dinilai adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, serta manajemen sekolah/madrasah belum sepenuhnya di pahami oleh Kepala sekolah maupun tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan di UPTD SD Negeri 1 Rejoagung.

Hasil wawancara dengan beberapa guru, bahwa guru-guru mengalami kesulitan untuk menyusun dokumen dan mempersiapkan bukti fisiknya. Instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP) 2020 sangat jauh berbeda dengan instrumen pada tahun-tahun sebelumnya, namun Rahman, et al (2017) menjelaskan bahwa permasalahan utama dalam pemahaman akreditasi bukan pada instrumennya, namun bagaimana sekolah melakukan evaluasi setiap waktu dengan mengacu pada delapan Standar Nasional pendidikan, sehingga sekolah mampu melihat kelemahan-kelemahan dan dapat menemukan strategi yang tepat dalam menyusun program kerja yang baru dan mengimplementasikan pada satuan pendidikan tersebut. Untuk itu, sebagai Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA) sebagai perpanjangan tugas BAN S/M propinsi dipandang perlu untuk melakukan pendampingan tersebut. Adapun tujuan dari kegiatan pendampingan tersebut adalah 1) peningkatan pemahaman tentang akreditasi mengacu pada IASP 2020, 2) kelengkapan dokumen sebagai bukti fisik akreditasi sehingga nantinya dapat meningkatkan status akreditasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemahaman terkait akreditasi yang sudah ada perubahan membawa lembaga untuk bias lebih mengetahui mekanisme akreditasi yang baru. Hal tersebut menjadi menarik untuk dilaksanakan pendampingan berupa sosialisasi dan simulasi yang dilakukan oleh peneliti yang pada dasarnya adalah sebagai praktisi dosen pengajar di salah satu kampus swasta dan sekaligus

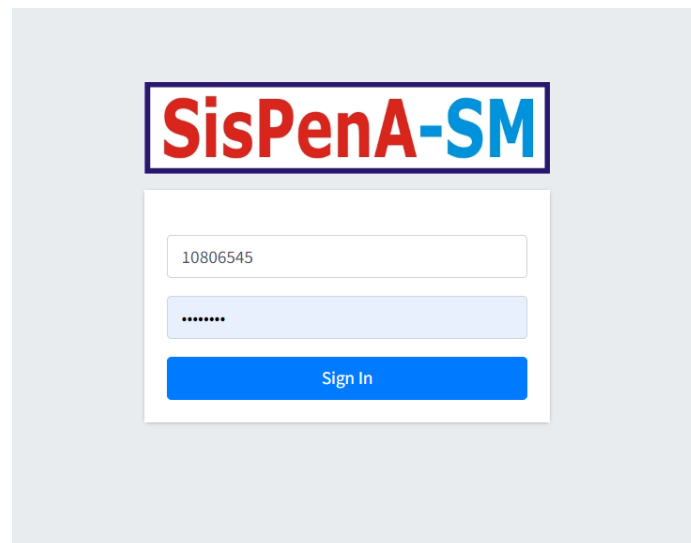
mendapat tugas tambahan sebagai asesor BAN SM Propinsi untuk melakukan pendampingan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan.

B. PELAKSAAN DAN METODE

Kegiatan simulasi akreditasi satuan pendidikan (IASP) 2020 di UPTD SD Negeri 1 Rejoagung Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung dilakukan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dengan tahapan sebagai berikut:

1) Perencanaan Simulasi Akreditasi BAN SM.

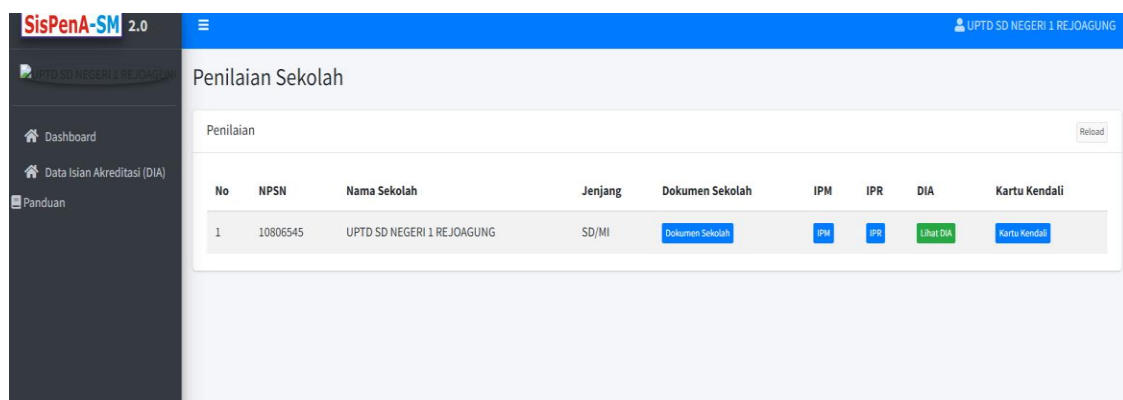
Pada kegiatan perencanaan ini, peneliti bersama dengan pihak sekolah merencanakan agenda kegiatan simulasi yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan data terkait dokumen yang akan di visitasi. Adapun pada tahap ini peneliti menjelaskan dengan detail terkait data yang akan di tanyakan oleh asesor BAN SM Propinsi Lampung. Data yang ditanyakan dapat di lihat melalui link sispena BAN SM <https://bansm.kemdikbud.go.id/sispna2020/login> sebagaimana yang terlihat berikut ini:



Gambar 1. Tampilan login untuk masuk ke akun Akreditasi Lembaga

Selanjutnya masuk dengan menggunakan username dan password dari UPTD SD Negeri 1 Rejoagung Kecamatan Batanghari untuk dapat menjelaskan terkait data yang akan di tanyakan serta menjelaskan rangkaian yang ada dalam kegiatan visitasi.

Adapun tampilan yang dijelaskann dalam kegiatan ini yaitu terkait data yang ada di dalam akun akreditasi, sebagai berikut:



Gambar 2. Tampilan Tab pada Lembaga satuan Akreditasi

2) Pelaksanaan Simulasi Akreditasi BAN SM.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk memberikan pemahaman sekaligus pelaksanaan simulasi dilakukan dengan beberapa tahapan yang dilakukan yaitu peneliti bertindak sebagai asesor yang

sekaligus memberikan bagian pertanyaan setiap butir yang ada yang selanjutnya mengkonfirmasi dengan penilaian.

3) Evaluasi Akreditasi BAN SM.

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman kepala sekolah dan guru-guru tentang IASP 2020 serta rangkaian kegiatan akreditasi yang kedepannya akan dilakukan visitasi oleh asesor BAN SM propinsi

4) Refleksi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen.

Pada tahap ini dilakukan untuk mengukur secara keseluruhan kesiapan sekolah dalam menghadapi Visitasi Akreditasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Kegiatan Simulasi Simulasi Akreditasi BAN SM.

Perencanaan akreditasi dilaksanakan peneliti pada tanggal 8 - 9 Agustus 2022. Sebagaimana yang telah peneliti jadwalkan melalui kesepakatan pihak lembaga dengan peneliti untuk merencanakan kegiatan simulasi akreditasi di UPTD SD negeri 1 Rejoagung kecamatan Batanghari. Pada tahap ini peneliti melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya; 1) memberikan sosialisasi terlebih dahulu terkait akreditasi baru yaitu IASP 2020 kepada Kepala Sekolah dan dewan guru serta siswa yang nantinya akan terlibat dengan visitasi akreditasi. 2) Memberikan Pelatihan IT yang nantinya digunakan dalam pelaksanaan akreditasi Daring. 3) membuat jadwal pelaksanaan simulasi dengan menggunakan zoom meeting.

Hal tersebut dapat di lihat dari foto kegiatan sebagai berikut;



Gambar 3. Pelaksanaan Perencanaan dan Sosialisasi

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pemahaman yang didapat dari kegiatan tersebut kepala sekolah, dewan guru dan siswa dapat mengerti arah dan tujuan akreditasi yang akan dilaksanakan oleh lembaga serta dapat menyiapkan secara maksimal.

2. Pelaksanaan Kegiatan Simulasi

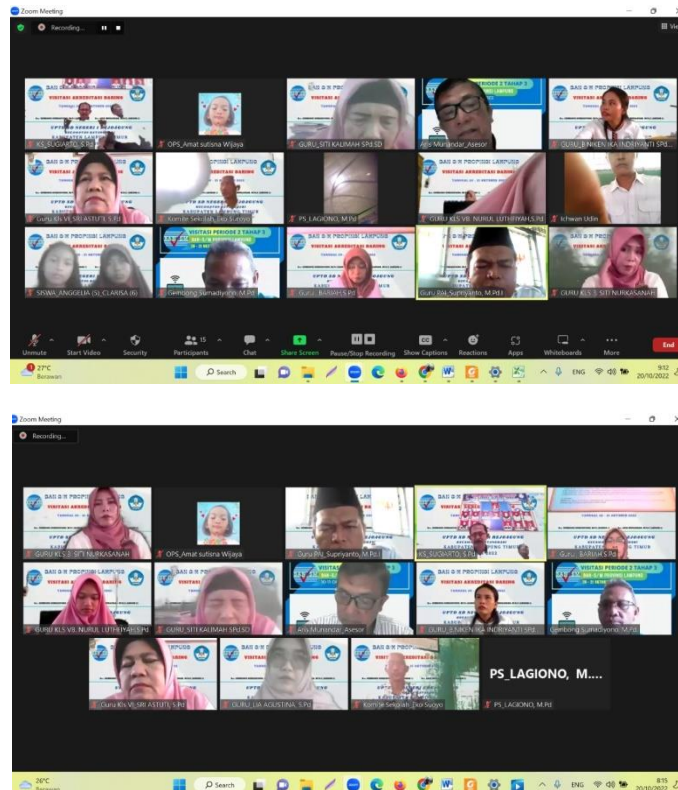
Pada kegiatan pelaksanaan peneliti melakukan kegiatan pada tanggal 10 Agustus 2022. Kegiatann yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Diawali dengan kegiatan temu awal: yaitu dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan diadakan acara pertemuan awal antara piha BAN SM propinsi dengan Lembaga Pendidikan yaitu UPTD SD Negeri 1 Rejoagung. Susunan acara di buat dengan mengagendakan sambutan dari kepala sekolah, dan Asesor.
2. Setelah selesai kegiatan Temu Awal, kegiatan visitasi diteruskan dengan 4 kegiatan Inti yakni :
 - a) Wawancara
Wawancara dilakukan antara peneliti yang bertindak sebagai Asesor dengan : Orang Tua/wali, Siswa, Kepala Satuan Pendidikan, & Pendidik & Tenaga Kependidikan.
 - b) Observasi
Peneliti yang bertindak sebagai Asesor melaksanakan kegiatan observasi yakni 1) Saprass (sarana & Prasarana) pendukung di UPTD SD Negeri 1 Rejoagung Kecamatan Batanghari. Mulai dari Ruang (Kelas, Perpustakaan, Kepsek, TU, UKS,BK, & Toilet (pria maupun wanita). 2) Observasi Kelas.
 - c) Telaah Dokumen

Peneliti yang bertindak sebagai Asesor menelaah Dokumen-dokumen pada DIA (Data Isian Akreditasi) yang sudah disusun terdiri dari 58 item untuk 35 butir (Mutu Lulusan, Mutu Guru, Pembelajaran, Manajemen Sekolah) di UPTD SD Negeri 1 Rejoagung.

d) Angket

Siswa sebanyak 20 orang diminta mengisi angket yang ada di butir pertanyaan. Pengisian secara online dan langsung dipandu oleh Peneliti yang bertindak sebagai asesor.



Gambar 4. Telaah dokumen dan Wawancara Simulasi

3. Evaluasi Kegiatan Simulasi.

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai asesor yaitu memberikan penilaian dari rangkaian keseluruhan yang dilakukan dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan simulasi yang dilakukan, Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman kepala sekolah dan guru-guru tentang IASP 2020 serta rangkaian kegiatan akreditasi yang kedepannya akan dilakukan visitasi oleh asesor BAN SM propinsi.

4. Refleksi

Tahap refleksi ini peneliti yang bertindak sebagai asesor memberikan rekomendasi dari kekurangan yang ada yang selanjutnya dapat di tindaklanjuti sebelum pelaksanaan visitasi dilakukan.

D. PENUTUP

Hasil analisis evaluasi simulasi akreditasi yang dilakukan di UPTD SD Negeri 1 Rejoagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur bahwa adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan tentang akreditasi sebagai salah satu faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tingkat pemahaman dari Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini diwujudkan dengan persiapan dokumen yang lengkap mengacu pada IASP 2020, yaitu dokumen pada komponen mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu tenaga Pendidik, dan Mutu manajemen sekolah. Dokumen dokumen yang dimaksudkan adalah dokumen yang diminta sesuai dengan butir-butir instrumen akreditasi dari dokumen kebijakan kepala sekolah terkait program kerja sekolah, bukti-bukti kinerja dan sampai pada tahap evaluasi program kerja.

E. DAFTAR PUSTAKA

Amrullah Aziz. 2015. "PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN." *Jurnal Studi Islam: Pancawahana* 10 (2). <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/2688>.

- Awaludin, Aulia Ar Rakhman. 2017. "Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2 (1). <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>.
- Dewi, Putri Restina, and Nur Ali. 2020. "Peningkatan skor akreditasi madrasah melalui lembaga penjaminan mutu." *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 5 (1): 44–54.
- Fitriyani, Fitriyani. 2019. "Konsep Organisasi Pendidikan Dalam Pemberdayaan Sekolah." *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 17 (02): 61–80. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v17i02.105>.
- Hasanah, Enung. 2021. "BEST PRACTICE PENJAMINAN MUTU LULUSAN BERBASIS IASP 2020 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN." *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 4 (2): 178–86. <https://doi.org/10.17977/um027v4i12021p178>.
- Ikhwan, Afiful. 2014. "Akreditasi Madrasah Aliyah (MA) Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional." *EDUKASI : Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 2 (2): 182–200.
- Kayyis, Rahmatika, and Siti Khoiriyah. 2021. "PENDAMPINGAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH SESUAI STANDAR IASP 2020 DI SD NEGERI 86 OKU." *JURNAL BAGIMU NEGERI* 5 (2): 38–48. <https://doi.org/10.52657/bagimunegeri.v5i2.1575>.
- Kogoya, Willius, and H. Uruwaya. 2022. "PENDAMPINGAN PENGGUNAAN IASP2020 UNTUK MENINGKATKAN KELAYAKAN AKREDITASI SEKOLAH DI SMA YPPK ASISI SENTANI TAHUN 2021." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 2 (1). <http://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/view/182>.